



PENGARUH DANA DESA, DAK FISIK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BENGKULU

Barika • Yusnida

Abstract. *The purpose of this study was to determine how the influence of village funds, Special allocation of physical funds and Economic growth on poverty in Bengkulu province. The data used is panel data which is a combination of 9 regencies in Bengkulu province in 2016-2019. The analysis technique used is multiple panel data regression. The result shows that the village fund variable have negative and significant on poverty. Special allocation of physical funds variable and economic growth variable are not significant in reducing poverty levels in districts in Bengkulu province.*

Keywords: *Village Funds, DAK Physical, Economic Growth, Poverty*

©2020 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

PENDAHULUAN

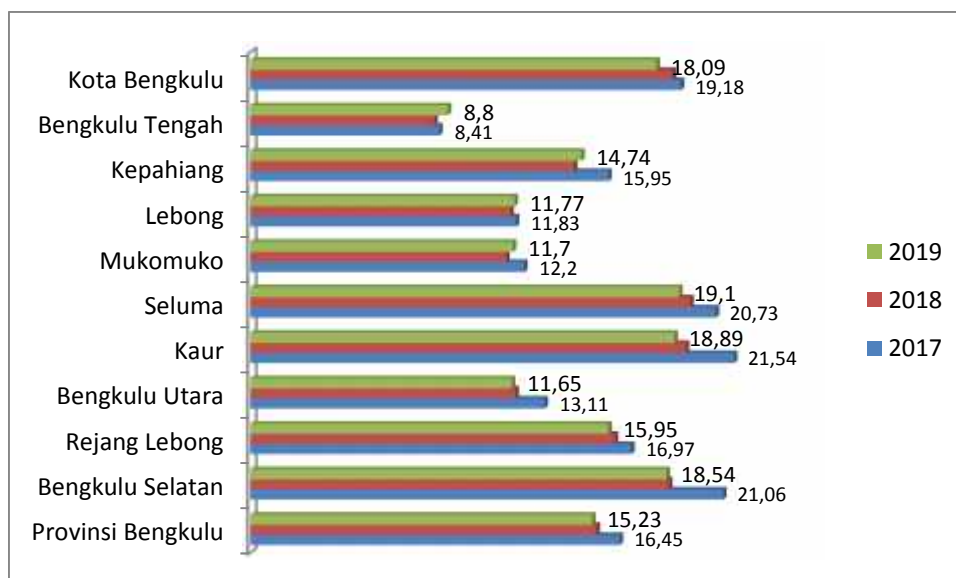
Di Indonesia, keberlanjutan pembangunan ditujukan pada lima tujuan utama dimana salah satunya adalah pengentasan kemiskinan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan pembangunan, sektor ekonomi dijadikan sasaran utama untuk dikembangkan. Upaya pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan upaya meratakan hasil pembangunan secara merata ataupun upaya meningkatkan pendapatan penduduk suatu daerah, adalah metode yang dapat ditempuh agar kemiskinan bisa berkurang dan ketidakmerataan pendapatan serta keterbelakangan dapat diminimalisir (Sirojuzilam, 2008).

Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa pada kurun waktu September 2017 - Maret 2018 jumlah penduduk yang berada pada kondisi miskin di Indonesia cenderung turun. Jumlah penduduk miskin di kota turun 128,2 ribu orang dan di desa sebanyak 505 ribu orang. Terlihat pada September 2017 penduduk miskin di wilayah kota berjumlah 10,27 juta orang sampai Maret 2018 menjadi 10,14 juta orang. Sedangkan di daerah pedesaan pada September 2017 sebanyak 16,31 juta orang dan menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018.

Kemiskinan yang terjadi di provinsi Bengkulu lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di Indonesia (nasional). Pada tahun 2017, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 10,64 persen, sedangkan di provinsi Bengkulu sebesar 16,45 persen. Pada tahun 2019 terjadi penurunan tingkat kemiskinan yakni menjadi 15,23 persen, dan kemiskinan nasional menjadi 9,41 persen. Gambar 1 menunjukkan tingkat kemiskinan di provinsi Bengkulu tahun 2017 – 2019.

Barika(✉)
Universitas Bengkulu
Email : barika_ramli@yahoo.co.id

Yusnida
Universitas Bengkulu
Email : yusnida.zaini@yahoo.co.id



Sumber : <https://www.bps.go.id>

Gambar 1. Prosentase Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa persentase penduduk yang hidup miskin di provinsi Bengkulu masih tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase jumlah masyarakat miskin provinsi lebih tinggi dari persentase nasional. Persentase penduduk miskin provinsi Bengkulu tahun 2017 sebesar 16,45 persen. Terdapat lima kabupaten yang memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang lebih rendah dari persentase jumlah penduduk miskin provinsi. Pada tahun 2019, daerah di provinsi Bengkulu dengan persentase jumlah penduduk miskin paling tinggi adalah kabupaten Seluma yakni 19,1 persen.

Situasi ini menuntut agar pemerintah dapat membuat kebijakan dan upaya yang tepat untuk agar kemiskinan dapat berkurang, ekonomi dapat tumbuh serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dapat menggunakan komponen DAU, DAK, dan PAD sebagai alat untuk memajukan perekonomian wilayah dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Pemerintah daerah pusat dan pemerintah daerah berupaya menanggulangi kemiskinan dengan berbagai rencana dan kebijakan pengurangan kemiskinan yang terpadu seperti bantuan sosial, penguatan kapasitas masyarakat dan penguatan UMKM. Salah satu programnya yaitu Dana Desa (DD) yang sumbernya berasal dari APBN, yang ditransfer ke desa. Dana tersebut adalah wajib untuk dialokasikan oleh pemerintah pusat, selanjutnya akan dialokasikan ke desa-desa dan merupakan apresiasi dan bentuk perhatian negara ke desa.

Pemberian dana desa dimulai sejak 2015 yang diberikan dalam jumlah tertentu kepada tiap desa di kabupaten yang bertujuan agar jarak/kesenjangan penduduk desa dan penduduk kota dapat diatasi. Penggunaan dana tersebut adalah untuk pembangunan fasilitas dasar di desa yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa dan dana desa diharapkan dapat menjadi penggerak dan pengungkit kemajuan ekonomi desa.

Tabel 1. Jumlah Realisasi Dana Desa, DAK Fisik dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu Tahun 2019

No	Kabupaten	Dana Desa (ribu rupiah)	DAK Fisik (ribu rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Bengkulu Selatan	109,814,061	124,271,387	4.99
2	Bengkulu Utara	169,662,351	120,814,304	4.96
3	Rejang lebong	110,877,573	112,745,622	4.97
4	Kaur	146,407,949	94,394,172	5.00
5	Seluma	143,052,107	149,630,898	4.95
6	Mukomuko	124,132,565	96,974,226	5.06
7	Lebong	78,571,304	72,229,505	4.98
8	Kepahiang	85,736,940	70,250,336	4.97
9	Bengkulu tengah	111,163,857	72,016,331	4.98

Sumber : *djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)*

Tabel 1 menunjukkan fenomena di mana di kota Bengkulu terjadi penurunan tingkat kemiskinan namun masih memiliki tingkat ketimpangan pengeluaran yang tinggi. Berdasarkan data dan fenomena diatas maka permasalahan yang hendak diteliti dalam riset ini adalah apakah jumlah dana desa, DAK fisik, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Bengkulu.

LITERATUR REVIEW

1. Tinjauan Teoritis

Amartya Sen (2006) menyatakan agar penanggulangan kemiskinan terjadi secara menyeluruh, maka bukan hanya pendapatan tolak ukurnya. Persoalan kemampuan seseorang terhadap kemampuan dan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan adanya kesempatan menjadi salah satu penyebab kemiskinan.

Dalam arti luas kemiskinan dapat dipandang sebagai kondisi ketiadaan uang maupun benda-benda yang dapat dipakai oleh seseorang untuk kelangsungan hidupnya. Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005) menyatakan kemiskinan merupakan suatu kondisi yang bersifat terintegrasi dalam lima dimensi, yaitu: 1) *proper* (miskin), 2) *powerless* (tidak berdaya), 3) *stateofemergency* (rentan dalam keadaan mendesak), 4) *dependence* (terikat), dan 5) *isolation* (asing) baik secara geografis ataupun sosiologis. Supriatna (1997) mengutarakan ada lima ciri penduduk miskin yakni:

- Faktor produksi milik sendiri tidak ada.
- Peluang untuk punya asset produski secara mandiri tidak ada.
- Berpendidikan rendah.
- Rata-rata atau kebanyakan tidak memiliki fasilitas.
- Relatif berusia muda dan tidak terampil.

Todaro & Smith (2006) berpendapat bahwa terdapat tiga nilai pokok yang ditunjukkan untuk berhasilnya pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu: 1) *sustenance* yaitu masyarakat mampu mengembangkan potensi untuk mencukupi kebutuhan pokok, 2) *selfesteem* yaitu rasa percaya diri meningkat, 3) *freedom from servitude* yaitu peningkatan kapabilitas penduduk dalam memberikan suaranya.

Lingkar kemiskinan merupakan kondisi yang dihadapi oleh seseorang dimana faktor penyebab kemiskinannya membentuk suatu pola yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Kondisi ini membentuk suatu pandangan bahwa jika seseorang atau suatu



daerah berada dalam situasi miskin maka akan susah untuk keluar dari kondisi tersebut atau tetap miskin. Kemajuan perekonomian agar lebih baik akan susah untuk dicapai.

Bentuk pasar yang tidak sempurna, keterbelakangan, serta aset yang terbatas akan memicu produktivitas yang rendah. Hal ini mengakibatkan penerimaan atas usaha menjadi rendah. Tingkat pendapatan yang rendah akan membawa dampak pada tingkat investasi, dimana investasi yang rendah dapat berbentuk investasi modal/*capital*, tabungan yang rendah dan tingkat sumber daya manusia yang rendah. Investasi yang rendah dapat mengakibatkan terjadinya keterbelakangan. Kondisi ini akan terus terjadi sehingga akan menjadi jebakan. Agar angka kemiskinan dapat dikurangi maka usaha dan upaya yang dilakukan harus mengarah pada kegiatan pemotongan lingkaran atau jebakan kemiskinan ini (Kuncoro, 2004).



Sumber: Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2004)

Gambar 2. Lingkaran Setan Kemiskinan

BPS mendefinisikan kemiskinan menggunakan konsep *basic needs approach* (kemampuan memenuhi kebutuhan dasar). Dalam konsep ini, kemiskinan diartikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi mencukupi keperluan hidupnya dalam tinjauan ekonomis. Secara ekonomis kebutuhan/keperluan hidup dapat dinilai berdasarkan besarnya pengeluaran yang dilakukan, seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok/primer dan non makanan penduduk dikatakan berada dalam kondisi miskin jika pengeluaran rata-rata perkapitanya di bawah Garis Kemiskinan.

PP Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang berasal dari APBN, ditujukan untuk pembangunan kemajuan desa, ditransfer ke APBD kabupaten/kota. Penggunaan dana ini adalah untuk biaya penyelenggaraan pemerintah, kegiatan pembangunan, serta kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat. Adapun tujuan pemberian dana desa yaitu untuk mengurangi persoalan kemiskinan. Hal ini didukung oleh penelitian Dewi (2018) dalam Sunu (2019) menyatakan bahwa dana desa memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan.

Defenisi DAK Fisik sendiri adalah alokasi dana yang diberikan APBN ke daerah yang memiliki tujuan pendanaan kegiatan pembangunan khusus fisik. Kegiatan-kegiatan khusus fisik yang dilakukan oleh daerah menyesuaikan pada program nasional. DAK Fisik bertujuan untuk :

- a. DAK Fisik Reguler, merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan masyarakat sejahtera dengan cara memenuhi pelayanan basis serta pemerataan ekonomi masyarakat.



- b. DAK Fisik Penugasan, bertujuan untuk memberi dukungan untuk menggapai prioritas negara dan daerah memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan khusus dan wilayah prioritas tertentu.
- c. DAK Fisik Afirmasi, merupakan upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada wilayah spesifik yang termasuk kelompok wilayah perbatasan, pulau-pulau, daerah yang mengalami ketertinggalan dan transmigrasi.

Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan yang menunjukkan pertambahan dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar, pertambahan aktivitas ekonomi ini memberikan efek pertambahan kemakmuran dalam masyarakat suatu wilayah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diartikan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Perekonomian dianggap tumbuh apabila nilai produksi barang dan jasa riil yang dihasilkan oleh suatu wilayah lebih besar dibandingkan nilai produksi barang dan jasa riil pada tahun sebelumnya.

2. Penelitian Terkait

Azwardi (2014) dalam penelitian yang berjudul Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, menyimpulkan bahwa di Sumatera Selatan dana ADD yang disalurkan belum selaras dengan ketentuan yang diberlakukan. Sedangkan jumlah daerah yang menyalurkan ADD meningkat.

Sari (2017) menganalisis dan mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten Tulungagung adalah jumlah Dana Desa yang diberikan. Pemberian Dana Desa dan ADD dinilai memiliki efektifitas dan keberhasilan pada upaya pengurangan kemiskinan di tiga belas desa. Meskipun demikian, 114 desa menyatakan bahwa pemberian Dana Desa tidak efektif.

Anwar (2016) meneliti Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado tahun 2001-2013) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan adalah sebesar 63,1%. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama alokasi anggaran pemerintah yang diterima dari PAD, DAU dan DAK, secara bersama-sama memberi kontribusi yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian Lalira (2018) mendapatkan hasil bahwa variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan secara simultan. Secara statistik, dana desa tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.

Setianingsih (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa di kabupaten Melawi, terdapat tiga penentu penggunaan dana desa yang dapat membuat angka kemiskinan menjadi turun yakni dana desa yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa, dana yang digunakan untuk membina masyarakat, dan dana yang diperuntukkan dengan tujuan memberdayakan masyarakat.

Hasil penelitian Sunu (2019) memperlihatkan hasil bahwa di provinsi Bali, dana desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan jumlah dana desa maka tingkat kemiskinan akan berkurang. Pengaruh positif signifikan juga dapat dilihat pada kaitan dana desa dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa, hal ini berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat jika jumlah dana desa yang diberikan bertambah. Adapun pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat kesejahteraan adalah negatif signifikan,



keadaan ini mengindikasikan jika tingkat kemiskinan meningkat maka tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi turun.

DATA DAN METODE ANALISIS

Analisa deskriptif kuantitatif dipergunakan pada kajian ini, dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari sumber publikasi (Riduan, 2004). Adapun data didapatkan dari Biro Pusat Statistik (BPS) diakses melalui internet dengan situs <https://www.bps.go.id> dan <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

Guna menjawab tujuan riset yang ingin dicapai, yakni mengetahui apakah dana desa, DAK fisik dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan maka metode analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) digunakan. Analisa data panel (*pooled data*) merupakan metode yang tepat untuk dipakai. Data yang dipergunakan merupakan data rentang waktu tahun 2016-2019 yang meliputi data wilayah kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kaur, Bengkulu Utara, Mukomuko, Bengkulu Tengah, Lebong, Rejang Lebong, dan Kepahiang.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data

Riset ini menggunakan data kabupaten-kabupaten di provinsi Bengkulu sebagai daerah penerima dana desa tahun 2016 – 2019. Data tersebut secara terperinci adalah:

a. Data Dana Desa Tahun 2015 – 2019

Dana desa mulai diberikan sejak tahun 2015. Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota Bengkulu juga mendapatkan porsi dana desa tersebut. Dalam penelitian ini, data dana desa merupakan panel data pada rentang tahun 2016 hingga 2019.

Tabel 2. Dana Desa di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2019

No	Kabupaten	Dana Desa (Ribu Rupiah)			
		2016	2017	2018	2019
1	Bengkulu Selatan	80.029.059	110.746.649	97.393.929	109.814.061
2	Bengkulu Utara	130.594.550	166.310.259	146.743.965	169.662.351
3	Rejang lebong	74.796.332	95.495.934	97.529.213	110.877.573
4	Kaur	114.705.102	145.777.851	129.967.425	146.407.949
5	Seluma	109.690.905	139.486.234	126.703.577	143.052.107
6	Mukomuko	90.529.932	115.058.353	106.544.049	124.132.565
7	Lebong	56.982.529	72.563.476	68.355.722	78.571.304
8	Kepahiang	64.305.935	81.496.596	74.958.035	85.736.940
9	Bengkulu tengah	85.262.139	108.405.061	98.197.538	111.163.857

Sumber : Publikasi djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)



b. Data DAK Fisik Tahun 2015 – 2019

Tabel 3. DAK Fisik

No	Kabupaten	DAK Fisik (Ribu Rupiah)			
		2016	2017	2018	2019
1	Bengkulu Selatan	99,909,930	103,901,000	63,693,824	124,271,387
2	Bengkulu Utara	154,686,020	117,861,000	79,042,631	120,814,304
3	Rejang lebong	113,863,560	90,083,000	100,265,042	112,745,622
4	Kaur	219,119,550	79,280,000	49,997,993	94,394,172
5	Seluma	165,553,740	79,311,000	76,294,775	149,630,898
6	Mukomuko	123,371,090	81,363,000	50,684,885	96,974,226
7	Lebong	128,157,770	60,167,000	47,784,215	72,229,505
8	Kepahiang	107,812,210	75,893,000	55,703,478	70,250,336
9	Bengkulu tengah	124,706,830	64,397,000	49,586,696	72,016,331

Sumber : Publikasi djk.kemenkeu.go.id (data diolah)

c. Data Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 – 2019

Riset ini menggunakan data pertumbuhan ekonomi dari wilayah yang mendapatkan dana desa yakni 9 kabupaten di provinsi Bengkulu. Pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten di provinsi Bengkulu ditunjukkan oleh tabel 4.

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2019

No	Kabupaten	Pertumbuhan Ekonomi (%)			
		2016	2017	2018	2019
1	Bengkulu Selatan	5.25	4.94	4.95	4.99
2	Bengkulu Utara	5.00	4.84	4.81	4.96
3	Rejang lebong	5.30	4.91	4.96	4.97
4	Kaur	5.28	5.00	4.97	5.00
5	Seluma	5.00	4.81	4.80	4.95
6	Mukomuko	5.59	5.21	5.01	5.06
7	Lebong	5.16	5.00	5.01	4.98
8	Kepahiang	5.63	5.13	5.00	4.97
9	Bengkulu tengah	5.00	4.95	4.97	4.98

Sumber : Publikasi BPS Bengkulu dalam angka

d. Data Kemiskinan Tahun 2015 – 2019

Untuk melihat besarnya kemiskinan, data yang dipakai adalah jumlah prosentase penduduk miskin di suatu wilayah. Tabel 5 menunjukkan besarnya tingkat kemiskinan di 9 kabupaten di provinsi Bengkulu tahun 2016 -2019.



Tabel 5. Tingkat kemiskinan di provinsi Bengkulu tahun 2016 -2019

No	Kabupaten	Tingkat Kemiskinan (%)			
		2016	2017	2018	2019
1	Bengkulu Selatan	22.10	21.06	18.65	18.54
2	Bengkulu Utara	13.67	13.11	11.81	11.65
3	Rejang lebong	17.81	16.97	16.23	15.95
4	Kaur	22.36	21.54	19.40	18.89
5	Seluma	21.68	20.73	19.60	19.10
6	Mukomuko	13.01	12.20	11.40	11.70
7	Lebong	12.26	11.83	11.59	11.77
8	Kepahiang	16.31	15.95	14.42	14.74
9	Bengkulu tengah	8.71	8.41	8.20	8.80

Sumber : Publikasi BPS Bengkulu dalam Angka

HASIL PENELITIAN DAN PENGUJIAN MODEL

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana desa, DAK fisik, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Bengkulu maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel. Panel data meliputi kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Bengkulu Tengah.

Tabel 6. Hasil Regresi Pengaruh Dana Desa, DAK Fisik dan PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN di Provinsi Bengkulu

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	104.5503	43.81020	2.386437	0.0256
LNDD(-1)	-3.693834	1.307769	-2.824531	0.0096
LNDKAF(-1)	0.613183	0.374884	1.635658	0.1155
GROWTH	-2.311016	2.266978	-1.019426	0.3186
R-squared	0.517074	Mean dependent var		1.094038
F-statistic	8.208768	Durbin-Watson stat		1.248081
Prob(F-statistic)	0.000681			

Sumber :Hasil Pengolahan Data, Eviews

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa diperoleh nilai koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,517 yang berarti bahwa kemampuan (variasi) variabel dana desa, DAK fisik, dan pertumbuhan ekonomi dalam menjelaskan tingkat kemiskinan adalah sebesar 51 persen, 49% diterangkan oleh (variasi) variabel lain. Nilai F hitung sebesar 8,208 dengan probabilitas sebesar 0,000 menyatakan secara simultan variabel bebas mempengaruhi kemiskinan di provinsi Bengkulu. Hasil uji t (parsial) menunjukkan hanya variabel dana desa yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Bengkulu.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil riset dan kajian yang telah dilakukan diketahui bahwa estimasi antara dana desa dengan tingkat kemiskinan menunjukkan adalah negatif dan signifikan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunu (2019;860), Sari (2017,44). Pengaruh negatif dan signifikan antara dana desa dengan tingkat kemiskinan



mengindikasikan bahwa jika jumlah dana desa yang diberikan semakin tinggi maka tingkat kemiskinan akan berkurang demikian pula sebaliknya. Nilai koefisien dana desa sebesar -3.69 dengan probabilitas 0,00 bermakna jika terjadi peningkatan dana desa sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar 3,69 persen. Pemerintah telah menetapkan bahwa “pemberian dana desa bertujuan untuk untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan”. Pemberian dana desa adalah bentuk dari terpenuhinya hak otonomi desa agar dapat menjadi desa yang maju serta berkembang.

Penggunaan dana desa di provinsi Bengkulu dikelompokkan dalam dua bagian yakni bagian pembangunan dan bagian pemberdayaan. Bagian pembangunan diantaranya adalah kegiatan-kegiatan pembangunan sarana dan prasarana publik seperti jalan, siring, jembatan, gedung PAUD, perpustakaan, sarana olah raga, dll. Bidang pemberdayaan meliputi kegiatan-kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, kegiatan pasyandu, kelompok tani, kelompok disabilitas, pencegahan stunting, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil estimasi DAK fisik (X2) memiliki nilai koefisien yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan (Y). Nilai probabilitas sebesar 0.115 lebih besar dari nilai $\alpha = 5\%$, atau $0.115 > 0.05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Penelitian yang dilakukan Anwar (2016), Rasu (2019) menghasilkan estimasi yang sama. Pengaruh positif antara DAK fisik terhadap tingkat kemiskinan berarti bahwa peningkatan jumlah DAK fisik akan meningkatkan tingkat kemiskinan (*ceteris paribus*). DAK fisik adalah dana yang berasal dari dana perimbangan yang ditujukan untuk pendanaan program khusus fisik. Penggunaan DAK fisik pemerintah daerah menyesuaikan dengan dengan prioritas nasional. DAK fisik di kabupaten-kabupaten di provinsi Bengkulu terdiri dari dana alokasi khusus reguler (di bidang pendidikan, kesehatan dan KB, perumahan air minum dan sanitasi, kedaulatan pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, transportasi, sarana dan prasarana perdagangan, sarana dan prasarana penunjang), dana alokasi khusus penugasan.

Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (X3) bernilai negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y). Nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (X3) sebesar -2.311 artinya pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1 persen maka akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 2,311 persen dengan asumsi variabel dana desa (X1), variabel DAK fisik (X2) pertumbuhan penduduk dianggap tetap. Nilai probabilitas sebesar 0,318 lebih besar dari nilai α yakni 5% atau $0,318 > 0,05$ sehingga H_0 diterima. Hasil penelitian Pangiuk (2018), Pananrangi (2012) menunjukkan hal yang sama bahwa “pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan”. Beberapa penyebab pertumbuhan ekonomi tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas, dimana terjadi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah namun pertumbuhan ekonomi tersebut tidak menyentuh secara langsung ke masyarakat. Tren nilai gini ratio yang meningkat dari 0,32 pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,34 pada tahun 2019 mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya dinikmati oleh golongan berpendapatan tinggi.



SIMPULAN DAN SARAN

Pengaruh variabel dana desa terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan. Tujuan pemberian dana desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan dapat terwujud.

Variabel DAK fisik dan variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten-kabupaten di provinsi Bengkulu, penggunaan DAK Fisik sebagian besar digunakan untuk pembangunan DAK regular yang lebih mengarah pada pembangunan sarana publik belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga disarankan penggunaan DAK fisik lebih cenderung kepada peningkatan sector perdagangan dan UMKM yang mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Widarjono. 2007. *Ekonometrika Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
- Anis, Setiyawati. 2007. "Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi , Pendekatan Analisis Jalur." *Jurnal Akluntansi Dan Keuangan Indonesia* 4(2):211–28.
- Anwar, Meilita Lukitasari, Sutomo Wim Palar, and Jacline I. Sumual. 2016. "Revenue To Economic Growth (Gdp) and Poverty in the City of Manado." 16(02):218–32.
- Azwardi; Sukanto. 1829. "Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan." 29–41.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2017*. provinsi Bengkulu.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2018*. provinsi Bengkulu.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2019*. provinsi Bengkulu.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2020*. provinsi Bengkulu.
- Chriswardani, Suryawati. 2005. "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Jurnal." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 8(No.03/september/2005):121–29.
- Falakhi, Boarnerges. 2018. "Merajalelanya Kemiskinan Di Indonesia." *Ekonomi Sosial*.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Dtrategi, Dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Lalira Dianti. 2018. "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18(4):62–72.
- MankiwN, Gregory. 2006. *Makro Ekonomi*. edited by Fitria Liza. Jakarta: Erlangga.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia.
- Nugraheni, Diyah and D. S. Priyarsono. 2012. "Kinerja Keuangan Daerah , Infrastruktur , Dan Kemiskinan : Analisis Kabupaten / Kota Di Indonesia 2006 – 2009 Local Financial Performance , Infrastructure , and Poverty : An Analysis of Districts / Municipalities in Indonesia 2006 – 2009 Pendahuluan." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 12(2):148–67.
- Pananrangi, A. Idham. 2012. "A.Idham A.Pananrangi, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan." *Jurnal Plano Madani* I:29–38.



- Pangiuk, Ambok. 2018. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013." *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research* 2(2):44.
- Peraturan pemerintah Nomor 60. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.*
- Permenkeu RI no.50/PMK.07/2017. 2017. *Peraturan Menkeu RI Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.*
- Perpres RI No 137 tahun 2015. 2016. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut."
- Rasu, Konny J. ..., Anderson G. Kumenaung, and Rosalina A. .. Koleangan. 2019. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 20(2):1.
- Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sari Intan Mala. 2017. "Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15(01):34–49.
- Setianingsih Irma. n.d. "Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Melawi." 1–18.
- Sirojuzilam. 2008. *Disparitas Ekonomi Dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat Dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*. Pustaka Bangsa Press.
- Sukirno Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sukirno Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukwika, Tatan. 2018. "Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Di Indonesia." *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 6(2):115.
- Sunu Made Krisna Kalpika. 2019. "Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali." 8:843–72.
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP).
- Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. 9th ed. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. edited by Amminudin dan Drs. Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.



